CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 4 No.2
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

Gushendarto[1], Wiralestari[2], Nela Safelia[3]
[1,2,3]Universitas Jambi
Email: gushendarto94@gmail.com

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, good corporate governance, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi yang merupakan entitas pelaksana anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pejabat struktural, bendahara dan staf penatausahaan pada 27 OPD, dengan total responden sebanyak 81 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) melalui bantuan perangkat lunak SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas, transparansi, good corporate governance, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, sistem pengendalian internal terbukti memoderasi pengaruh akuntabilitas dan good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan, namun tidak memoderasi pengaruh transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal serta penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik, khususnya dalam pemahaman tentang peran variabel moderasi dalam hubungan antara faktor-faktor determinan dan kualitas pelaporan keuangan.*
Kata kunci *: Akuntabilitas, Transparansi, Good Corporate Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

PENDAHULUAN

Sejak pelaksanaan reformasi pada tahun 1999, pemerintah Indonesia telah menerapkan desentralisasi sebagai strategi untuk mencapai pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Situasi ini berlanjut dengan upaya meningkatkan kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang tepat dan inisiatif untuk memperkuat tanggung jawab sosial dari pemerintah. Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan manajemen keuangan yang baik, agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan transparan (Agung & Mulyani, 2020).

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Pentingnya pertanggungjawaban dalam pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dituntut memenuhi indikator relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menunjang keberlangsungan dan kemajuan sistem keuangan. Nilai efisiensi didorong dengan adanya pengelolaan anggara secara sistematis akan memberikan potensi berupa peningkatan atas semakin akuratnya penulisan pelaporan keuangan daerah sehingga posibilitas terhadap terjadinya kecurangan penulisan yang terindikasi korupsi maupun kolusi dapat diminimalkan (Widiastuti dkk., 2023). Salah satu pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu dari opini yang diberikan oleh BPK. Pemerintah yang baik di pusat maupun daerah harus terus memperbaiki laporan keuangan untuk mencapai transparansi kepada masyarakat. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 7 tahun antara 2017 hingga 2023 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). bahwa mutu laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan dalam karakteristik laporan keuangan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa daerah yang mendapatkan penilaian audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memiliki laporan keuangan yang bebas dari masalah dan kesalahan, yang tentunya akan meningkatkan mutu laporan keuangannya.

Berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di antaranya akuntabilitas, transparansi, *good corporate governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) memberikan pertanggungjawaban baik itu penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk melihat pertanggungjawaban tersebut (Palalangan, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Berlian & Paddery (2022) menemukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Selain akuntabilitas, transparansi juga diidentifikasi sebagai faktor penting

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, yang mana seluruh proses kegiatan atau aktivitas pemerintahan dapat diketahui dan diakses secara bebas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh (Mitan dkk., 2023) menemukan bahwa transparansi yang tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Mencapai kualitas laporan keuangan yang baik yaitu perlu adanya *good corporate governance* (GCG) atau yang disebut tata kelola organisasi yang baik merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas instansi (Kuraesin & Yadiati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Rizal (2024) menemukan bahwa pengawasan yang efektif melalui dewan komisaris dan komite audit dalam kerangka *good corporate governance* dapat meminimalisir kesalahan dalam laporan keuangan guna mengurangi risiko manipulasi data serta cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat.

Kualitas laporan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi Penggunaan teknologi informasi seperti komputer dan jaringan dalam pengolahan data akan menghasilkan banyak manfaat, baik dari segi keakuratan atau ketepatan hasil kerja serta reputasinya sebagai alat serbaguna (*multiprocessing*) (Arfiansyah, 2020). Penelitian yang dilakukan Pebiana & Halkadri (2025) menemukan bahwa pemanfatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka memastikan proses pembangunan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah serta pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses penggunaannya. Dengan terciptanya penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Kapriana & Agung, 2020).

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nadia & Rizal (2024) dan Cafriana dkk (2024) dimana penelitian sebelumnya berfokus pada *di pegawai sub-bagian keuangan dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)* namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan penelitian ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, seperti objek penelitian, variabel penelitian, serta untuk memperluas cakupan dengan menambahkan variabel baru yaitu akuntabilitas, transparansi dan objek yaitu *OPD yang terdiri dari dinas, badan dan sekretariat*. Berdasarkan fenomena, keterbatasan dan ketidak-konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi".

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kontingensi

Teori kontingensi pertama kali diperkenalkan oleh Fred Fiedler (1967) yang mengemukakan bahwa keefektifan kelompok pemerintahan tergantung pada kesesuaian antara cara interaksi seorang pemimpin dengan anggota timnya, serta seberapa besar situasi tersebut memberikan kendali dan pengaruh bagi pemimpin itu. Pendekatan kontingensi sangat penting untuk menilai elemen-elemen situasional yang membuat sistem pengendalian manajemen dalam suatu instansi menjadi lebih efisien. Pengendalian yang baik dapat mendorong pemerintah dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, yaitu dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan (Pujanira, 2017).

Teori Stewardship

Stewardship theory (Donaldson & Davis, 1991) dalam Asmawati & Basuki (2019), menyatakan bahwa tidak ada situasi dimana manajemen termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih fokus pada tujuan utama, atau kepentingan organisasi. Teori ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dengan keberhasilan organisasi, artinya terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat yang

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

mewakili kepuasan dan pemerintah daerah yang mewakili keberhasilan organisasi.

Teori Agensi

Teori agensi dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik atau pemegang saham) dan *agent* (manajer atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan). Menurut Supriyono (2018), *agency theory* merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara pemberi kontrak (*principal*) dan penerima kontrak (*agent*) dimana prinsipal mengontrak agen untuk dapat bekerja demi kepentingan serta tujuan dari prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat suatu keputusan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dokumen yang menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah terkait penerimaan serta pengeluaran dana yang berasal dari masyarakat. Kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat melalui hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kualitas dari laporan keuangan merupakan hasil dari tahapan dalam aktivitas akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang mudah dimengerti oleh pengguna, serta standar-standar yang harus ada dalam informasi akuntansi agar bisa memenuhi harapan tersebut (Erawati, 2022). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat empat kriteria untuk memenuhi kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas menjadi dasar penting seorang pengelola (agen) dalam memberikan hasil pelaporan berkaitan dengan realisasi yang terjadi di lapangan dengan hasil pencatatan yang dilakukan dan pengembangan pada sistem akuntabilitas yang dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten berpeluang memberikan peningkatan dalam segi pelayanan akuntansi publik. Menurut Telabah & Handajani (2018) bahwa dalam mengukur akuntabilitas terdapat 4 indikator yang digunakan antara lain yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses,

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan.

Transparansi

Transparansi adalah bentuk sikap keterbukaan pihak pemerintahan mengenai perumusan serta maksud dari kebijakan publik yang ditetapkan dan implementasi program kerja yang disertai anggaran yang dikeluarkan untuk merealiasikan program kerja tersebut. Dengan demikian transparansi menjadi hal penting yang dapat meminimalkan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dari pengelolaan anggaran pemerintah oleh pihak-pihak tertentu (Achyani, 2019). Menurut Zubaidah & Nugraeni (2023) bahwa dalam mengukur transparansi terdapat 3 indikator yang digunakan antara lain yaitu informatif, keterbukaan, pengungkapan.

Good Corporate Governance

The Indonesian Institute for Corporate Governance (2012) menyatakan bahwa *good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan hukum dan norma. Menurut *United Nations Development Program* (1997), bahwa dalam mengukur *good corporate governance* terdapat 9 indikator yang digunakan antara lain yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, visi strategi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi mengacu pada penggunaan teknologi, seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya, untuk memproses data, mengelola informasi, dan meningkatkan proses kerja secara efisien. Hal ini memungkinkan otomatisasi, peningkatan kecepatan pemrosesan, pengurangan biaya, dan laporan yang lebih akurat dan tepat waktu. Dalam pemerintahan, teknologi informasi mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke layanan publik dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Firdausi & Prihandana, 2022). Menurut Wardani & Ika (2017) bahwa dalam mengukur pemanfaatan teknologi informasi terdapat 5 indikator yang digunakan antara lain yaitu proses

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

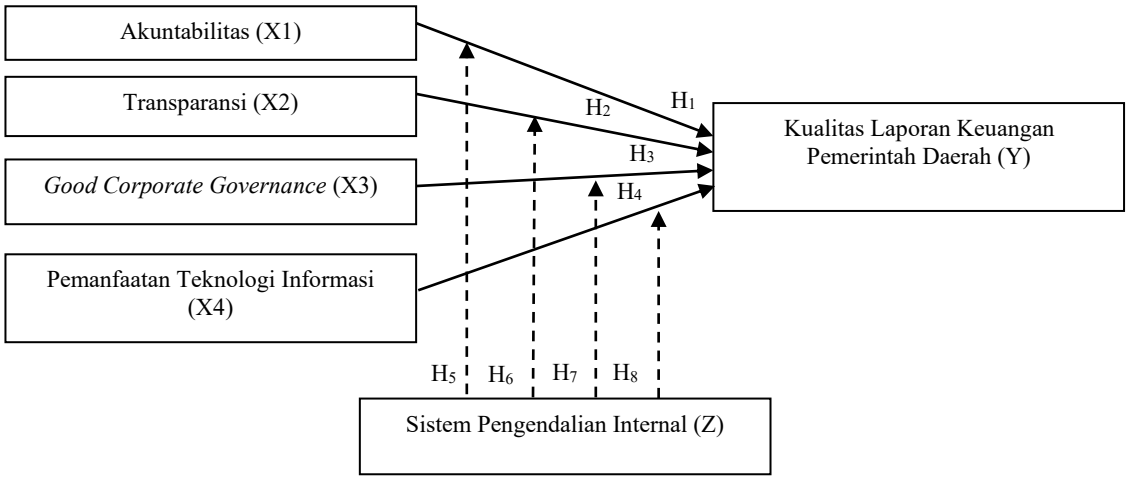
kerja berbasis elektronik, proses pengolahan dan penyimpanan data keuangan, pengelolaan informasi melalui jaringan internet, sistem manajemen, perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan jaminan yang cukup kepada manajemen bahwa organisasi dapat merealisasikan tujuan dan targetnya. Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, teknik, dan ukuran yang terintegrasi untuk melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan serta keandalan informasi akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendukung pelaksanaan kebijakan yang diinginkan manajemen. (Sriyono, 2022). Menurut Safitri (2021) bahwa dalam mengukur sistem pengendalian internal terdapat 5 indikator yang digunakan antara lain yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal.

Adapun model penelitian yang merepresentasikan alur pengaruh antar variabel secara sistematis sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Berdasarkan model penelitian yang telah disusun, maka hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan untuk menguji hubungan antar variabel yang telah diidentifikasi yaitu:

H1: Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

H2: Terdapat pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Terdapat pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H4: Terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H5: Terdapat pengaruh akuntabilitas yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H6: Terdapat pengaruh transparansi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H7: Terdapat pengaruh *good corporate governance* yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H8: Terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif. Pengujian hipotesis ini merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena antara dua variabel atau lebih seperti pada penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi, *good corporate governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Objek dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, *Good Corporate Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan. Subjek dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah – Dinas, Badan dan Sekretariat di Kota Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah – Dinas, Badan, Inspektorat dan Sekretariat yang berjumlah sebanyak 27 OPD di Kota Jambi.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang berarti pemilihan sampel dilakukan dengan tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14, yang menyatakan bahwa PPK SKPD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan SKPD. Selanjutnya, sampel lain yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah yang sama, khususnya pasal 19 dan pasal 26, menunjukkan bahwa kasubag perencanaan dan keuangan bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada sekretaris secara berkala. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, para responden memiliki keterlibatan secara langsung secara teknis. Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan yaitu tiga orang tiap OPD yang terdiri dari PPK, Bendahara dan Staf Penatausahaan sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 81 responden.

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner atau angket adalah alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang dirancang berdasarkan variabel-variabel penelitian dan diberikan kepada responden, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi untuk mengukur besarnya variabel-variabel yang diteliti. Responden diminta untuk memberikan jawabannya dengan cara memberi tanda check list (√) pada kolom jawaban yang disediakan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah pengukuran dengan skala Likert, dengan perhitungan skor sebagai berikut: Selalu (SL) 5 poin, Sering (SR) 4 poin, Kurang-Kadang (KD) 3 poin, Jarang (JR) 2 poin, Tidak Pernah (TP) 1 poin. Kemudian dokumentasi, yaitu data laporan hasil pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, Permendagri No. 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, buku-buku dan jurnal terkait.

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Penelitian ini menggunakan metode

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

analisis data yaitu software SPSS versi 30 yang meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi moderasi dan uji hipotesis.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator Pengukuran	Skala Pengukuran	Sumber Referensi
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	• Relevan • Andal • Dapat Dibandingkan • Dapat Dipahami	Ordinal	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Akuntabilitas (X_1)	• Akuntabilitas kejujuran dan hukum • Akuntabilitas proses • Akuntabilitas program • Akuntabilitas kebijakan	Ordinal	Telabah & Handajani (2018)
Transparansi (X_2)	• Informatif • Keterbukaan • Pengungkapan	Ordinal	Zubaidah & Nugraeni (2023)
Good Corporate Governance (X_3)	• Partisipasi • Supremasi hukum • Transparansi • Cepat tanggap • Membangun konsensus • Kesetaraan • Efektif dan efisien • Bertanggung jawab • Visi strategi	Ordinal	UNDP (1997)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4)	• Proses kerja secara elektronik • Pengolahan dan penyimpanan data keuangan • Pengolahan informasi dengan jaringan internet • Sistem manajemen • Perawatan dan	Ordinal	Wardani & Ika (2017)

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Variabel	Indikator Pengukuran	Skala Pengukuran	Sumber Referensi
	pemeliharaan pada perangkat komputer		
Sistem Pengendalian Internal (Z)	• Lingkungan pengendalian • Penilaian risiko • Aktivitas pengendalian • Informasi dan komunikasi • Pemantauan pengendalian internal	Ordinal	Safitri (2021)

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari PPK, Bendahara dan Staf Penatausahaan yang dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, latar belakang Pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh total 81 responden yang memenuhi syarat. Dari penyebaran 81 kuesioner hanya 75 kuesioner yang kembali dengan presentasi pengembalian sebesar 92%. Selanjutnya, data responden tersebut dikelompokkan berdasarkan karakteristik demografis untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 2. Karakteristik Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	23	31%
Perempuan	52	69%
Total	**75**	**100%**

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 23 orang laki-laki (31%) dan 52 orang perempuan (69%). Komposisi ini menunjukkan bahwa responden perempuan mendominasi jumlah partisipan dalam penelitian ini. Perbedaan jumlah ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti latar belakang populasi yang memang didominasi oleh salah satu jenis

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

kelamin, atau tingkat kesediaan dalam mengisi kuesioner yang lebih tinggi pada salah satu kelompok gender.

Tabel 3. Karakteristik Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Persentase
SMA	5	7%
D-III	3	4%
S-1/D-IV	58	77%
S-2	9	12%
S-3	0	0%
Lainnya	0	0%
Total	**75**	**100%**

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1), yaitu sebanyak 58 orang atau sebesar 77%. Responden yang berasal dari jenjang pendidikan SMA berjumlah 5 orang (7%). Responden dari jenjang Diploma III (D-III) berjumlah 3 orang (4%), jenjang (S2) berjumlah 9 orang (12%), tidak terdapat responden dari jenjang (S3) dan lainnya.

Tabel 4. Karakteristik Latar Belakang Pendidikan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Akuntansi	24	32%
Manajemen	9	12%
IT	3	4%
Lainnya	39	52%
Total	**75**	**100%**

Berdasarkan data pada tabel 4 diatas, terlihat bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, yaitu sebanyak 24 orang (32%). Responden dari latar belakang manajemen, sebanyak 9 orang (12%). Sebanyak 3 orang responden (4%) berasal dari bidang studi Teknologi Informasi (TI). Terakhir, terdapat 39 responden (52%) dari bidang studi lainnya, yang mencakup bidang-bidang seperti hukum, pendidikan, psikologi, dan sebagainya.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Tabel 5. Karakteristik Pengalaman Kerja

Keterangan	Jumlah	Persentase
5 Tahun	14	19%
6-15 Tahun	35	46%
16-25 Tahun	17	23%
> 26 Tahun	9	12%
Total	**75**	**100%**

Berdasarkan data pada tabel 5 diatas, mayoritas responden memiliki pengalaman kerja dalam rentang 6 hingga 15 tahun, yaitu sebanyak 35 orang atau 46%. Sebanyak 14 responden (19%) memiliki pengalaman kerja 5 tahun. Responden dengan pengalaman kerja 16 hingga 25 tahun berjumlah 17 orang (23%). Sementara itu, hanya 9 responden (12%) yang memiliki pengalaman kerja > 26 tahun.

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan (seperti kuesioner) valid dan reliabel, sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dianalisis lebih lanjut.

Uji Validitas

Metode yang digunakan untuk menilai validitas kuesioner tersebut adalah korelasi *product moment* atau menggunakan *bevariate pearson*.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R_{Hitung}	R_{Tabel}	Keterangan
Akuntabilitas (X_1)	$X_{1.1}$	0,598	0,2272	Valid
	$X_{1.2}$	0,631	0,2272	Valid
	$X_{1.3}$	0,628	0,2272	Valid
	$X_{1.4}$	0,612	0,2272	Valid
	$X_{1.5}$	0,655	0,2272	Valid
	$X_{1.6}$	0,424	0,2272	Valid
	$X_{1.7}$	0,497	0,2272	Valid
	$X_{1.8}$	0,511	0,2272	Valid
	$X_{1.9}$	0,556	0,2272	Valid
	$X_{1.10}$	0,621	0,2272	Valid

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Variabel	Indikator	R_{Hitung}	R_{Tabel}	Keterangan
	$X_{1.11}$	0,603	0,2272	Valid
	$X_{1.12}$	0,604	0,2272	Valid
Transparansi (X_2)	$X_{2.1}$	0,712	0,2272	Valid
	$X_{2.2}$	0,363	0,2272	Valid
	$X_{2.3}$	0,837	0,2272	Valid
	$X_{2.4}$	0,826	0,2272	Valid
	$X_{2.5}$	0,807	0,2272	Valid
	$X_{2.6}$	0,824	0,2272	Valid
	$X_{2.7}$	0,766	0,2272	Valid
	$X_{2.8}$	0,260	0,2272	Valid
Good Corporate Governance (X_3)	$X_{3.1}$	0,583	0,2272	Valid
	$X_{3.2}$	0,595	0,2272	Valid
	$X_{3.3}$	0,508	0,2272	Valid
	$X_{3.4}$	0,525	0,2272	Valid
	$X_{3.5}$	0,481	0,2272	Valid
	$X_{3.6}$	0,491	0,2272	Valid
	$X_{3.7}$	0,560	0,2272	Valid
	$X_{3.8}$	0,633	0,2272	Valid
	$X_{3.9}$	0,620	0,2272	Valid
	$X_{3.10}$	0,649	0,2272	Valid
	$X_{3.11}$	0,741	0,2272	Valid
	$X_{3.12}$	0,515	0,2272	Valid
	$X_{3.13}$	0,661	0,2272	Valid
	$X_{3.14}$	0,565	0,2272	Valid
	$X_{3.15}$	0,571	0,2272	Valid
	$X_{3.16}$	0,456	0,2272	Valid
	$X_{3.17}$	0,673	0,2272	Valid
	$X_{3.18}$	0,673	0,2272	Valid
Pemanfaaatan Teknologi Informasi (X_4)	$X_{4.1}$	0,847	0,2272	Valid
	$X_{4.2}$	0,458	0,2272	Valid
	$X_{4.3}$	0,506	0,2272	Valid
	$X_{4.4}$	0,471	0,2272	Valid

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Variabel	Indikator	R_{Hitung}	R_{Tabel}	Keterangan
	$X_{4.5}$	0,462	0,2272	Valid
	$X_{4.6}$	0,566	0,2272	Valid
	$X_{4.7}$	0,585	0,2272	Valid
	$X_{4.8}$	0,738	0,2272	Valid
	$X_{4.9}$	0,660	0,2272	Valid
	$X_{4.10}$	0,690	0,2272	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	$Y_{.1}$	0,617	0,2272	Valid
	$Y_{.2}$	0,267	0,2272	Valid
	$Y_{.3}$	0,239	0,2272	Valid
	$Y_{.4}$	0,242	0,2272	Valid
	$Y_{.5}$	0,336	0,2272	Valid
	$Y_{.6}$	0,847	0,2272	Valid
	$Y_{.7}$	0,780	0,2272	Valid
	$Y_{.8}$	0,324	0,2272	Valid
	$Y_{.9}$	0,825	0,2272	Valid
	$Y_{.10}$	0,640	0,2272	Valid
	$Y_{.11}$	0,637	0,2272	Valid
	$Y_{.12}$	0,555	0,2272	Valid
	$Y_{.13}$	0,425	0,2272	Valid
	$Y_{.14}$	0,627	0,2272	Valid
	$Y_{.15}$	0,613	0,2272	Valid
	$Y_{.16}$	0,415	0,2272	Valid
Sistem Pengendalian Internal (Z)	$Z_{.1}$	0,654	0,2272	Valid
	$Z_{.2}$	0,738	0,2272	Valid
	$Z_{.3}$	0,624	0,2272	Valid
	$Z_{.4}$	0,628	0,2272	Valid
	$Z_{.5}$	0,749	0,2272	Valid
	$Z_{.6}$	0,619	0,2272	Valid
	$Z_{.7}$	0,665	0,2272	Valid
	$Z_{.8}$	0,66	0,2272	Valid
	$Z_{.9}$	0,678	0,2272	Valid
	$Z_{.10}$	0,424	0,2272	Valid

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Berdasarkan tabel 6 diatas, seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel dalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari nilai r_{tabel} dan memiliki nilai signifikansi (p-value) di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item mampu mengukur indikator variabel secara tepat dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dengan demikian, instrumen penelitian ini memiliki kualitas yang baik dalam merepresentasikan konstruk masing-masing variabel.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha > 0,60.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	*Role of Thumb*	Keterangan
Akuntabilitas	0,644	0,6	Reliabel
Transparansi	0,664	0,6	Reliabel
Good Corporate Governance	0,618	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,677	0,6	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,825	0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,674	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa pada pengujian ini dilakukan secara variabel bukan secara item pertanyaan pada setiap variabel yang dapat dilihat hasilnya adalah nilai cronbah's alpha lebih besar daripada 0,6 maka dapat dikatakan reliebel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap penting dalam analisis regresi linear berganda untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun dapat memberikan hasil estimasi yang tidak bias, efisien, dan konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Uji Normalitas

Metode uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah kolmogorov-Sminov (KS).

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.53129329
Most Extreme Differences	Absolute	.317
	Positive	.892
	Negative	-.317
Test Statistic		.217
Asymp. Sig. (2-tailed)		.428[a,c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel 8 diatas, hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,428, yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	***Tolerance***	***Variance Inflation Factor***	**Keterangan**
Akuntabilitas	0,524	0,6	Tidak terjadi multikolinearitas
Transparansi	0,590	0,6	Tidak terjadi multikolinearitas
Good Corporate Governance	0,323	0,6	Tidak terjadi multikolinearitas

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Variabel	*Tolerance*	*Variance Inflation Factor*	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,514	0,6	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0,416	0,6	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan tabel 9 diatas, hasil uji multikolinearitas seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi, namun pada penelitian ini menggunakan uji Glejser.

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	*Sig.*	Keterangan
Akuntabilitas	0,258	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Transparansi	0,683	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Good Corporate Governance	0,068	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,220	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal	0,461	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 10 diatas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa pengujian ini menggunakan metode uji Glejser yang nilainya dilihat dari sig. Pada variabel akuntabilitas, transparansi, *good corporate governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka dapat dikatakan data tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal. Variabel

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

moderasi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara akuntabilitas, transparansi, *good corporate governance* dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi moderasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Akuntabilitas*Sistem Pengendalian Internal	.507	.053	.693	2.972	.038
	Transparansi*Sistem Pengendalian Internal	.495	.048	.678	1.865	.178
	*Good Corporate Governance**Sistem Pengendalian Internal	.433	.052	.492	2.064	.042
	Pemanfaatan Teknologi Informasi*Sistem Pengendalian Internal	.329	.053	.659	1.471	.149
a. *Dependent Variable*: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						

t_{tabel} dihitung dari = 5% dan df = n-k, dimana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 75 responden, Sehingga t_{tabel} yaitu 1.99495.

- Nilai signifikansi interaksi antara Akuntabilitas (X1) dengan Sistem Pengendalian Internal (Z) sebesar 0.038 < 0.05 dan nilai t_{hitung} (2.972) > t_{tabel} (1.99495), artinya sistem pengendalian internal secara signifikan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Nlai signifikansi interaksi antara Transparansi (X_2) dengan Sistem Pengendalian Internal (Z) sebesar 0.178 > 0.05 dan nilai t_{hitung} (1.865) < t_{tabel} (1.99495), artinya sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Nilai signifikansi interaksi antara *Good Corporate Governance* (X_3) dengan Sistem Pengendalian Internal (Z) sebesar 0.042 < 0.05 dan nilai t_{hitung} (2.064) > t_{tabel} (1.99495), artinya sistem pengendalian internal secara signifikan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- Nilai signifikansi interaksi antara Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4) dengan Sistem Pengendalian Internal (Z) sebesar 0.149 > 0.05 dan nilai t_{hitung} (1.471) < t_{tabel} (1.99495), artinya sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam suatu sampel data untuk menyimpulkan bahwa hipotesis tertentu berlaku dalam populasi. Dalam penelitian kuantitatif, uji hipotesis digunakan untuk mengonfirmasi kebenaran dugaan hubungan antar variabel, seperti uji t dan uji koefisien determinasi.

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Uji t adalah uji statistik inferensial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel dependen (Y) dalam model regresi. Hasil uji t disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Signifikasi Parameter Individual (uji t)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.951	.576		4.168	.000
	Akuntabilitas	.213	.084	.222	2.831	.006
	Transparansi	.354	.078	.394	2.180	.011
	Good Corporate Governance	.274	.081	.330	2.638	.026
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.231	.082	.261	2.595	.004
a. *Dependent Variable*: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						

t_{tabel} dihitung dari = 5% dan df = n-k-1, dimana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

75 responden, Sehingga t_{tabel} Yaitu 1,99444.

1. Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel akuntabilitas menunjukkan nilai t_{hitung} 2.831 > t_{tabel} 1.99444 dengan nilai signifikan sebesar 0.006 < 0.05. Dengan demikian didapatkan kesimpulan dari nilai signifikan yaitu 0.006 adalah lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel transparansi menunjukkan nilai t_{hitung} 2.180 > t_{tabel} 1.99444 dengan nilai signifikan sebesar 0.011 < 0.05. Dengan demikian didapatkan kesimpulan dari nilai signifikan yaitu 0.011 adalah lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. *Good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel *good corporate governance* menunjukkan nilai t_{hitung} 2.638 > t_{tabel} 1.99444 dengan nilai signifikan sebesar 0.026 < 0.05. Dengan demikian didapatkan kesimpulan dari nilai signifikan yaitu 0.026 adalah lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai t_{hitung} 2.595 > t_{tabel} 1.99444 dengan nilai signifikan sebesar 0.004 < 0.05. Dengan demikian didapatkan kesimpulan dari nilai signifikan yaitu 0.004 adalah lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Besar kecilnya pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dinilai dengan menggunakan koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *adjusted R square*. Hasil uji koefisien

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

determinasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]									
				Std.	Change Statistics				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.808[a]	.781	.725	.406	.295	22.431	5	69	.019
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas, *Good Corporate Governance*									
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									

Berdasarkan tabel 13 diatas, hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai dari koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) dalam penelitian ini sebesar 0.725. Artinya bahwa 72.5% perubahan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam akuntabilitas, transparansi, *good corporate governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal sedangkan sisa 27.5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda yang menunjukan bahwa nilai t untuk variabel akuntabilitas adalah t_{hitung} 2.831 > t_{tabel} 1.99444 dengan nilai signifikan sebesar 0.006 < 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Bambang (2021), Tias dkk (2023), Hamsinar (2022) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik, maka semakin transparan, tepat, dan andal informasi keuangan yang disajikan. Akuntabilitas mendorong setiap unit kerja untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan melaporkan hasilnya secara jujur, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengaruh Tranparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda yang menunjukan bahwa nilai t untuk variabel transparansi adalah t_{hitung} 2.180 > t_{tabel} 1.99444 dengan nilai signifikan sebesar 0.011 < 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi & Biana (2024), Azza & Nugraeni (2023), Raspati & Simanjuntak (2024) menemukan bahwa tranparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbukaan informasi memungkinkan publik dan pihak terkait untuk mengakses, memahami, dan mengawasi penggunaan anggaran secara jelas. Tingkat transparansi yang tinggi mencerminkan komitmen dalam menyajikan laporan keuangan yang jujur, lengkap, dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kualitas laporan yang disusun.

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda yang menunjukan bahwa nilai t. untuk variabel *good corporate governance* adalah t_{hitung} 2.638 > t_{tabel} 1.99444 dengan nilai signifikan sebesar 0.026 < 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh David dkk (2020), Ali & Fatmayanti (2024), Komang dkk (2024) menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan prinsip-prinsip GCG seperti akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan keadilan mendorong terciptanya sistem pelaporan keuangan yang tertib, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. GCG yang baik memperkuat pengawasan internal dan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan integritas dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan pemanfatan teknologi

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda yang menunjukan bahwa nilai t untuk variabel pemanfaatan teknologi infomasi adalah t_{hitung} 2.595 > t_{tabel} 1.99444 dengan nilai signifikan sebesar 0.004 < 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebiana & Halkadri (2025), Sandy dkk (2024), Peny dkk (2024), menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem digital yang terintegrasi mempercepat proses pencatatan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan akurasi data keuangan. Teknologi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui akses informasi real-time, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal, tepat waktu, dan sesuai standar.

Pengaruh Akuntabilitas yang dimoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Diketahui hasil uji analisis regresi moderasi yang menunjukan bahwa nilai sig. untuk interaksi variabel akuntabilitas dengan variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 0.038 < 0.05 dan nilai t_{hitung} (2.972) > t_{tabel} (1.99495). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan ketika akuntabilitas tinggi didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, maka pelaporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kualitas laporan keuangan meningkat secara signifikan.

Pengaruh Tranparansi yang dimoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keenam membuktikan sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Diketahui hasil uji analisis regresi moderasi yang menunjukan bahwa nilai sig. untuk interaksi variabel akuntabilitas dengan variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 0.178 > 0.05 dan nilai t_{hitung} (1.865) < t_{tabel} (1.99495). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbukaan informasi lebih dipengaruhi oleh komitmen untuk menyampaikan data secara jujur dan jelas, bukan oleh kekuatan sistem pengawasan internal. Dengan kata lain, meskipun sistem pengendalian internal diterapkan, jika transparansi tidak dijalankan secara maksimal, kualitas laporan keuangan tetap tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Pengaruh *Good Corporate Governance* yang dimoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketujuh membuktikan sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Diketahui hasil uji analisis regresi moderasi yang menunjukan bahwa nilai sig. untuk interaksi variabel akuntabilitas dengan variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 0.042 < 0.05 dan nilai t_{hitung} (2.064) > t_{tabel} (1.99495). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Rizal (2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG seperti akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dan etika GCG didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, maka proses pelaporan keuangan menjadi lebih tertib, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dimoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedelapan membuktikan sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh pemanfatan teknologi informasi terhadap kualitas

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Diketahui hasil uji analisis regresi moderasi yang menunjukan bahwa nilai sig. untuk interaksi variabel akuntabilitas dengan variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 0.149 > 0.05 dan nilai t_{hitung} (1.471) < t_{tabel} (1.99495). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Rizal (2024), Anggraeini (2024), Devi dkk (2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Efektivitas teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan lebih bergantung pada penggunaan sistem yang tepat dan kemampuan pengguna, bukan pada kekuatan pengendalian internal. Dengan kata lain, meskipun pengendalian internal berjalan baik, tanpa pemanfaatan teknologi secara optimal, dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan tetap terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. *Good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

DAFTAR PUSTAKA

Achyani, F. (2019). The Determinant Accountablity of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4 (2), 118-135. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521

Agung, M. F., & Mulyani, S. (2020). Pengaruh Good Governance dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan*, 4(2), 142-149. https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.352

Aldi, S. P., & Biana, A. I. (2024). Pengaruh Penggunaan SISKEUDES, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(4), 4611-4627. https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2469

Ali, F., & Fatmayanti. (2024). Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 2(2), 282-290. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1379

Anggraeini, N. P. (2024). Impact of Human Resource Competence, IT Utilization, and Government Accounting Standards on Financial Statement Quality: The Moderating Role of Internal Control Systems. *Indonesian Management and Accounting Research*, 21(2), 247-278. http://dx.doi.org/10.25105/imar.v21i2.21350

Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 3(1), 67-82. https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369

Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. AKURASI: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 63–76. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15

Azza, N. Z., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 7(3), 978-988. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Berlian, A., & Paddery. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Sdmterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Rejang Lebong. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 8(2), 52-58. https://doi.org/10.53494/jira.v8i2.159

Cafriana, C. B., Parawiyati & Dyah, A. P. (2024). The Effects of Information Systems and the Utilization of Information Technology on the Quality of Financial Reports with Internal Control as Moderation. Journal of Economics, Finance and Management Studies, 7(1), 476-482. https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i1-50

David, W. H., Nur, D., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang. E-JRA: E-Journal Research Accounting, 9(11), 104-116.

Devi, P. S., Eka, N. S., & Widia, A. (2024). Determinants Quality of Financial Reports with Government Internal Control System. Jurnal Mantik, 7(4), 4055-4065.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*.

Erawati, T. (2022). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 10(01), 17–25. https://doi.org/10.26460/ja.v11i1.2990

Febriana, N. V., & Bambang, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(4), 1-24.

Firdausi, S., & Prihandana, W. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks SRI KEHATI Tahun 2014- 2018). Jurnal Akuntansi AKUNESA, 10(2), 12–23. https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n2.p12-23

Fred E. Fiedler (1967). Theory of Leadership Effectiveness.New York:

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

McGrawHill Book, Company.

Hamsinar. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia, 3(4), 85-90. https://doi.org/10.37251/jpaii.v3i4.640

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3, 305-360.

Kapriana, A. P. & Agung, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada OPD di Kabupaten Kuburaya). Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomu Universitas Tanjungpura, 9(1), 47-70. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41143

Komang, A. S. G., I Wayan, W., Agus, W. S. G., & Made, I. P. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening. *MUSYTARI: Jurnal Neraca Manajemen dan Ekonomi*, 8(1), 111-120. https://doi.org/10.8734/musytari.v8i1.5477

Kuraesin, A. D., & Yadiati, W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan di Badan Usaha Milik Negara. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9(2), 356-364. https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1516

Mitan, W., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Nipa, U. N. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Doreng Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1(4), 276–291. https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2051

Nadia, R., & Rizal, Y. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 14(1), 1-11. https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6064

Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). Jurnal Ilmiah

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Akuntansi dan Bisnis, 4(2). 120-138. https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260

Pebiana, A., & Halkadri, F. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 7(1), 16-29. https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.1965

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peny, C. A., Regita, D. S., Sri, D. J., & Ayke, N. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. *BALANCE: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 57-71. https://doi.org/10.32502/jab.v9i1.8198

Raspati, G. G. M., & Simanjuntak, B. H. (2024). Analysis of the Impact of Accountability and Transparency on the Quality of Financial Reports with Internal Control System as a Moderating Variable. *MULTIFINANCE: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2(1), 83-92. https://doi.org/10.61397/mfc.v2i1.196

Safitri, A. R. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi). Thesis: Universitas Jambi.

Sandy, P. S., Zakaria, Fahrudin, P., Muh. Yamin, N., & Suratini. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Keerom. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 30-52. https://doi.org/10.37531/sejaman.v7i1.6288

Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. J-Iscan: Journal of Islamic Accounting Research, 2(1), 17-35.

Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: UGM PRESS.

Tias, M. F., Supami, W. S., Ati, R., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). Jurnal Akuntansi Neraca, 1(2), 45-56. https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index

Telabah, I. W. S., & Handajani, L. (2018). Implementation of Performance Accountability System for Government Institution (SAKIP): Determinants and Consequence in Local Government. *International Business and Accounting Research* https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/ibarj.v2i2.41

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

United Nations Development Program (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development.

Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi, 5(2), 88-98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270

Widiastuti, I. A., Indraswarawati, S. A. P. A., & Putra, I. M. E. L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 65–75.

Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Slemen. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 7(3), 978–988. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.